

**“PENDIDIKAN AGAMA DAN MULTIKULTURALISME  
PADA SEKOLAH ISLAM TERPADU”**

**Ali Ismunadi, M.Pd.I**

**DOSEN STEI AR-RACHMAN**

**ABSTRAK**

*Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan kemajemukan bangsa ini, disatu sisi merupakan aset kekayaan khasanah budaya bangsa, tapi lain sisi dapat menjadi potensi konflik manakala tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak memiliki sikap yang proposional terhadap kemajemukan ini. Kemajemukan yang memiliki potensi konflik tinggi dan sentral yaitu isu yang berkenaan dengan kemajemukan beragama. Agama merupakan isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik dikalangan masyarakat. Maka dari itu, jurnal ini ditulis guna untuk mencoba menggagas wacana tentang pendidikan agama islam dengan membawa misi multiculturalisme, agama, humanisme, dan demokrasi. Dan memberikan solusi serta pencerahan dalam menuju suatu perubahan yang signifikan terhadap pendidikan agama islam dalam segala aspeknya, sehingga pendidikan agama islam menjadi pendidikan yang inklusif dan dinamis.*

**Kata Kunci : Pendidikan Agama, Multikultural**

**A. PENDAHULUAN**

Ditinjau dari aspek teoritis maupun empiris, multikulturalisme dan pendidikan dalam konteks Indonesia adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Secara teori atau konsep hal ini terlihat dari arti pendidikan itu sendiri, di mana pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan emosional peserta didik yang merupakan potensi fitrah yang diberikan oleh Tuhan yang bertujuan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya,

masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>1</sup> Hal ini juga sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah, bahwa fungsi dan tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern, juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua bagian manusia terhadap kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Istilah multikulturalisme dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, yang pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama.<sup>2</sup>

Dalam Agama Islam untuk menunjukkan idealitasnya tertulis dalam al-Qur'an<sup>3</sup> adalah untuk saling mengenal dan menghormati berbagai budaya, ras, dan agama sebagai suatu realitas kemanusiaan. Akan tetapi pada saat yang sama peta dunia diwarnai konflik akibat SARA.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 20 tahun 2003, Bab I, pasal 1, lihat juga PP No 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I pasal 1 dan Bab II pasal 2

<sup>2</sup> <https://blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/> diakses pada 18/5/2019 jam 04:20

<sup>3</sup> QS. al-Hujurât : 13

<sup>4</sup> Seperti yang terjadi di Sambas, Sampit, Ambon, Poso, kasus pengeboman Vihara di Jakarta Barat. Menurut Setara Institut di Jakarta, terdapat berbagai kasus tiap tahunnya yang berkenaan dengan masalah SARA terutama agama, terdapat 216 serangan terhadap minoritas beragama pada tahun 2010, 244 kasus pada tahun 2011, 264

Kesenjangan antara idealitas dan realitas itulah yang perlu dijawab dengan memberikan pemahaman multikultural dalam proses pendidikan agama.

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Sekarang ini jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 250 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta sebagai macam aliran kepercayaan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini mengambil studi pada Jaringan Sekolah Islam Terpadu karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusup (2017), “*EKSklusivisme BERAGAMA JARINGAN SEKOLAH ISLAM TERPADU (JSIT) YOGYAKARTA*” pada salah satu kesimpulannya menyebutkan karakteristik tekstualis JSIT dalam memahami sumber-sumber Islam di antaranya tampak dalam penafsiran yang belum cukup terbuka untuk menerima keragaman.<sup>6</sup>

Pada penelitian sebelumnya, Suyatno (2013) menjelaskan dalam, “*Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia*” bahwa dalam program pengembangan dirinya yakni dalam kependuan, berdasarkan wawancara peneliti, program ini menjadi program yang sangat bermuatan ideologis. Hal ini dapat dilihat dari semboyan yang diajarkan oleh para guru kependuan kepada siswa sebagai berikut: *Allahu Ghayatuna* (Allah tujuan kami), *Rasul Qudwatuna* (Rasul Muhammad teladan kami), *al Qur'an Syir'atuna* (al Qur'an undang-undang kami), *al Jihad Sabiluna* (jihad adalah perjuangan kami), *as Syahadah Umniyatuna* (mati syahid adalah cita-cita kami). Semboyan yang diajarkan kepada siswa program kependuan tersebut sama persis dengan

---

kasus pada tahun 2012. Di Jakarta menurut Wahid Institute, mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan 184 intoleransi pada tahun 2011.

<sup>5</sup> Keragaman beragama dapat dilihat dari presentasi penduduk yang menyatakan diri sebagai pemeluk salah satu agama, sebagai berikut : Islam (88%), Kristen (6,11%), Katolik (3,18%), Hindu (1,79%), Budha (0,61%) Konghucu (0,10%), dan lain-lain (0,11%). Dilihat dari keragaman suku, sebagai berikut: Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai (41,7%) dari total populasi, suku Sunda (15,41%) dari total populasi, suku Tionghoa Indonesia berjumlah sekitar (3,7%) dari total populasi, suku Melayu (3,4%), suku Madura (3,3%), suku Batak (3,0%), suku Minangkabau (2,7%), suku Betawi (2,5%), suku Bugis (2,5%), suku Arab-Indonesia (2,4%), suku Banten (2,1%), suku Banjar (1,7%), suku Bali (1,5%), suku Sasak (1,3%), suku Makasar (1,0%), suku Cirebon (0,9%)

<sup>6</sup> Muhammad Yusup, *Religi: Eksklusivisme Beragama Jaringan Sekolah Islam Terpadu*, Vol.13 No.1, 2017, h. 93-94

semboyan yang diajarkan Hasan al Bana di Mesir dalam rangka untuk membentuk loyalitas para aktivis gerakan terhadap Ikhwanul Muslimin.<sup>7</sup>

Namun pada penelitian yang lebih lengkap dilakukan oleh, Heni Lestari dalam disertasinya, “*Pendidikan Agama dan Nasionalisme (Studi kasus Sekolah Islam Terpadu di Jakarta)*”, menjelaskan Terkait dengan pembentukan moral bangsa, Sekolah Islam Terpadu telah menetapkan standar mutunya, yaitu “Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yg dimiliki seseorang. Potensi ini tidak terbatas fisik dan intelektual namun juga budi pekerti, moral dan spiritual. Selain itu pendidikan juga harus mampu menyiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat dan bermakna untuk masyarakat”. Implementasi model pendidikan ini telah direalisasikan sejak berdirinya sekolah-sekolah Islam Terpadu tahun 1993. Jauh sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan. Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak sekedar menjadi bagian dari mata pelajaran tapi menjadi budaya sekolah yang terintegrasi dengan seluruh sendi- sendi kehidupan di sekolah dan di luar sekolah.<sup>8</sup>

Dengan beragamnya kejadian yang SARA yang ada tentunya pendidikan sedari dini memberikan peran yang penting dalam pemahaman multikulturalisme masyarakat. Jumlah Sekolah Islam Terpadu yang berada di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 2.418 unit<sup>9</sup> belum lagi Sekolah Islam Terpadu yang tidak tergabung dalam JSIT atau berafiliasi kepada kelompok – kelompok atau ORMAS tertentu. Dari jumlah yang banyak ini tentu peran yang penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Penataan kembali pendidikan nasional yang menyeimbangkan antara sisi intelektual (sisi kognitif/akademis), sisi emosional (sisi karakter) dan sisi spiritual (nilai-nilai agama) dengan memahami akar kebudayaan setempat merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mengembangkan jiwa cinta damai dan kemerdekaan, serta menjunjung tinggi ideologi negara dan pemerintahan yang dibingkai dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berBhineka Tunggal Ika. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, korelasi antara

---

<sup>7</sup> Suyatno, Jurnal Pendidikan Islam: *Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi dan Trend Baru Pendidikan Islam di Indonesia* :: Volume II, Nomor 2, Desember 2013/1435, h.368-369

<sup>8</sup> Heni Lestari, Disertasi Doktoral Pendidikan Islam: *Pendidikan Agama dan Nasionalisme (Studi pada Sekolah Islam Terpadu di Jakarta)*, Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2017, h.23-24.

<sup>9</sup> <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/15/ot3za2313-pesat-perkembangan-sekolah-islam-terpadu> diakses pada 13 Mei 2019

pendidikan dan multikulturalisme ini diperkuat dengan tinjauan dari aspek teoritis maupun empiris di mana keduanya memperlihatkan bahwa sasaran akhir dari pendidikan Islam adalah melahirkan manusia Indonesia seutuhnya atau insan kamil.

## **B. Permasalahan**

Pendidikan agama merupakan satu dari tiga bidang studi yang wajib diberikan dalam tiap jenjang pendidikan. Pendidikan agama bertujuan membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Sehingga terwujud masyarakat yang toleran, pluralis dan menghargai perbedaan agama di masyarakat.<sup>10</sup> Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan lima prinsip dasar, yakni: *pertama*, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. *Kedua*, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari – hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika serta moral dalam berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Pada sisi yang lain, kita pun merasakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial, kekerasan semakin sulit diatasi, sebab dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.

## **C. Sejarah Munculnya Pendidikan Multikulturalisme**

Sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme, diwacana-kan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut

---

<sup>10</sup> Undang – Undang Republik Indonesia. No.20 pasal 37 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>11</sup> Puspita Handayani, Jurnal Pendidikan; *Pendidikan Agama Berbasis Multikulturalisme*, tt

diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena ketika itu hanya dikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih beragama Kristen. Adapun golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.<sup>12</sup>

Gerakan hak-hak sipil tersebut, menurut James A. Banks berimplikasi pada dunia pendidikan dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan di Amerika pada tahun 1960-an dan 1970-an belum memberikan kesempatan yang sama bagi semua ras untuk memperoleh pendidikan.<sup>13</sup> Praktik pendidikan yang diskriminatif ini juga menuai protes dari tokoh gerakan hak-hak sipil dan lembaga ilmiah. Pada intinya mereka menuntut agar diadakan reformasi dalam pendidikan.

Selain gerakan-gerakan, ada juga yang merespons praktik kehidupan diskriminatif di Amerika dengan mendirikan pusat-pusat studi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*). George Washington William adalah di antara sarjana yang mendirikan pusat studi etnik yang mengkaji gambaran negatif dan stereotip terhadap orang-orang Afrika-Amerika. Melalui kajian tersebut, mereka menunjukkan komitmen personal, profesional, dan abadi untuk mengangkat derajat orang-orang Afrika-Amerika. Ada juga tuntutan dari para pemikir pendidikan dan para guru di sekolah-sekolah Amerika secara Individual. Mereka adalah James A. Banks, Joel Spring, Peter McLaren, dll.

Wacana pendidikan multikultural juga berhembus sampai ke Indonesia.<sup>14</sup> Menurut Abdullah Aly,<sup>15</sup> wacana ini mulai digulirkan sekitar tahun 2000, melalui berbagai diskusi,

---

<sup>12</sup> Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium International ke-3, (Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002), hlm.1

<sup>13</sup> Lihat James A. Banks & Cherry A. McGee Bank, *Multikultural Education Issues and Perspectives*, (Boston: Allyn and Bacon, 1989), hlm. 4-5. Lihat juga, Geneva Gay, "A Synthesis of Scholarship in Multikultural Education," dalam <http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrsdp/le0gay.htm>

<sup>14</sup> Wacana pendidikan multikultural dalam batas-batas tertentu mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal tersebut terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat

seminar, workshop, yang kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dan jurnal yang bertema multikulturalisme.<sup>16</sup> Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia juga digemakan oleh para penulis melalui media massa. Banyak tulisan yang beredar di jurnal, surat kabar, dan majalah yang intinya mengusulkan agar diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia. Mereka memandang bahwa dalam masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia, penerapan pendidikan multikultural merupakan keharusan yang mendesak. Pendidikan multikultural dapat mendidik para peserta didik bersedia menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Mata pelajaran yang dapat dijadikan sarana untuk mendidik antara lain, adalah bahasa Indonesia,<sup>17</sup> Pendidikan seni Nusantara,<sup>18</sup> dan Pendidikan Agama.<sup>19</sup> Materi tersebut dijadikan sarana untuk memasukkan ide pendidikan multikulturalisme, termasuk mereorientasikan pembelajaran agama. Namun sebuah bangsa tidak akan berkembang apabila tingkat pluralitasnya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar jumlah perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil apabila ditekan secara institusional. Berangkat

---

multikultural (Bab III, pasal 4, ayat 1). Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III, pasal 4, ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

<sup>15</sup> Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 97

<sup>16</sup> Pada tahun 2000, Jurnal Antropologi Indonesia Departemen Antropologi Universitas Indonesia mengadakan symposium internasional di Makassar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, nasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman. Pada Tahun 2001 dan 2002, juga diadakan symposium serupa dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar. Pada tahun 2003, Jurnal Antropologi Indonesia menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Education in Southeast Asian Nation: Sharing Experience*. Lebih jelas lihat, Abdullah aly, *Pendidikan Multikultural.....*, hlm. 97-98. Pada Tahun 2007, Badan Litbang Departemen Agama mengadakan penelitian tentang 'Pemahaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Para Da'i'. Lihat, Adian Husaini, *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 344

<sup>17</sup> Anton M. Moeliono, *Keaneka-an Bahasa dalam Keaneka-an Budaya*, dalam Media Indonesia, Edisi akhir Tahun 2002: Satu Indonesia, P. 1-12. Lihat juga, Dendy Sugono, *Bahasa Indonesia: Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia*, dalam Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: satu Indonesia, h. 1-6

<sup>18</sup> Pudentia, *Peranan Pendidikan Seni Nusantara dalam Pembentukan Pluralisme*, dalam Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: Satu Indonesia, hlm. 1-4

<sup>19</sup> M. Amin Abdullah, *Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan agama* dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm.14. Lihat Juga Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi Pendidikan Islam* dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm.17-18. Lihat juga, Busman Edyar, *RUU Sisdiknas dan Pemikiran Pluralisme Multikultural*, (Kompas, Maret 2003) edisi 31.

dari kronologi pergulatan wacana tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama.<sup>40</sup>Selanjutnya, yang melatar belakangi munculnya gagasan, dan wacana mengenai pendidikan multikultural adalah adanya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dipraktekkan oleh pemerintah orde baru. Pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, maupun budayanya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hanya terlihat semangot ke-Ika-annya daripada ke-Bhineka-annya. Keberagaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, guna menyempurnakan pemahaman, bahwa pendidikan multikulturalisme, Secara garis besar memiliki karakter-karakter tersendiri, diantaranya, *Pertama*: eksistensi pihak yang lemah diberi perhatian khusus dan ditingkatkan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, *Kedua*: pada saat tertentu bersikap inklusif, dengan menawarkan teori bagi pihak yang lemah. *Ketiga*: teori lain terutama teori yang terkait dengan dunia sosial dan teori multikultural itu sendiri dikritisi oleh teoritis multikultural *Keempat*: Teoritis multikultural menyadari bahwa mereka dibatasi oleh sejarah, konteks kultural, dan konteks tertentu. *Kelima*: teori bagi pihak yang lemah disusun dan diubah struktur sosial, prospek, dan kultur individu mereka oleh teoritis multikultural. *Keenam*: dunia sosial dan intelektual diupayakan oleh teoritis multikultural menjadi lebih terbuka dan beragam.<sup>21</sup>Selain karakter pendidikan multikultural yang telah disebut di atas, didukung oleh tiga karakteristik pendidikan multikultural lainnya, yaitu, *Pertama*: pendidikan multikulturalisme berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, *kedua*: pendidikan multikultural berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, serta *ketiga*: pendidikan multikultural mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Kemudian pendidikan multikulturalisme tidak lepas dari permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu: politik, demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak budaya komunitas, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral.

---

<sup>20</sup> James, A. Banks, *Multikultural Education and Goals* dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (eds), *Multicultural Education; Issues and Perspectives*, (America: Allyn Bacon, 1997), hlm. 14

<sup>21</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 106-107



Pada tataran aplikasi, faham multikulturalisme mulai dihembuskan, dengan mengkonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “*integrating force*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya.<sup>22</sup>

#### **D. SIGNIFIKANSI DAN KESIMPULAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Kemajemukan ini, di satu sisi merupakan berkah, karena kemajemukan itu sesungguhnya merefleksikan kekayaan khasanah budaya. Namun di sisi lain, kemajemukan juga berpotensi besar untuk tumbuh subur konflik, terutama jika keberagaman tersebut tidak mampu dikelola dengan baik. Penting kiranya pendidikan agama lebih mendominasi peserta didik berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dengan mengedepankan pendidikan mengarah pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Hal ini akan berhasil jika; pertama, religiusitas peserta didik tidak berfokus pada penguasaan konsep saja, tetapi lebih menyentuh pada aspek *Transfer of activity*. kedua, basis epistemologi pendidikan agama dan metode pembelajarannya harus sinergi dengan bidang studi lainnya. Ketiga, Profesionalisme guru agama lebih diperhatikan sebab berpengaruh pada kewibawaannya, juga media pembelajaran pendidikan agama yang kurang memadai.

Penempatan pendidikan agama sebagai basis nilai dari keseluruhan proses pembelajaran di sekolah menjadi sesuatu yang strategis. Model pembelajaran ini mustahil terjadi jika, di Sekolah – sekolah Islam Terpadu tidak menggunakan pendidikan berbasis budaya (Multikultural).

Pendidikan yang memahami multikulturalisme menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan tersebut secara kreatif. Pendidikan multikultural hendaknya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai multikultur itu sendiri dalam institusi pendidikan.

Melalui pendidikan multikultural kita dapat memberi seluruh siswa-tanpa memandang status sosioekonomi; gender; orientasi seksual; atau latar belakang etnis, ras atau budaya-kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>22</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 88

Abdullah, M. Amin. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP. 2005

Aly, Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

Al Qur'an dan Terjemahannya versi DEPAG

Banks, James. *Teaching Strategies For Ethnic Studies*. Newton: Allyn and Bacon

Cresswel, W. John, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach* (London: Sage Publication, 1994).

Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. *Badan Pusat Statistik*. 2011.

Handayani, Puspita, Jurnal Pendidikan; *Pendidikan Agama Berbasis Multikulturalisme*, tt

<https://blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/> diakses pada 18/5/2019 jam 04:20

<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/15/ot3za2313-pesat-perkembangan-sekolah-islam-terpadu> diakses pada tanggal 13 Mei 2019

<http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm>

Lestari, Heni, Disertasi Doktoral Pendidikan Islam: *Pendidikan Agama dan Nasionalisme (Studi pada Sekolah Islam Terpadu di Jakarta)*, Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2017

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Muhammad, Yusup, *Religi: Eksklusivisme Beragama Jaringan Sekolah Islam Terpadu*, Vol.13 No.1, 2017

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana. 2003

Suparlan, Parsudi. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium International ke-3, (Denpasar Bali, 16-21 Juli. 2002

Undang – undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003

Suyatno, *Jurnal Pendidikan Islam :: Volume II, Nomor 2, Desember 2013/1435*